

	News Title : Januari-November 2023 Bappebti Catat Transaksi Kripto hingga Rp122 Triliun	
	Media Name : chatnews.id	Journalist : Pius
	Publish Date : 15 January 2024	Tonality : Positive
	News Page :	News Value : 1,500,000
	Resources : Kasan (Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bappebti)	Ads Value : 500,000
	Section/Rubrication : home	Topic : Transaksi Kripto

[Home](#) / [Kriptopedia](#) / Januari-November 2023 Bappebti Catat Transaksi Kripto hingg...

Januari-November 2023 Bappebti Catat Transaksi Kripto hingga Rp122 Triliun



Author: **Pius**
Senin, 15 Januari 2024

Share: [f](#) [X](#) [wa](#) [print](#)



Aset Kripto. (Freepik/iurilimotov)

CHATNEWS - Kripto menjadi salah satu pilihan masyarakat modern di Indonesia. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), bahkan mencatat total nilai transaksi aset digital periode Januari-November 2023 mencapai Rp122 triliun.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala **Bappebti**, Kasan mengatakan, jumlah pelanggan aset kripto sejak diaturnya aset kripto hingga November 2023 mencapai 18,25 juta pelanggan. Sementara pedagang aset kripto yang telah memperoleh Tanda Daftar sebagai Calon Pedagang Fisik Aset Kripto (CPFAK) ada 33 perusahaan.

"Total nilai transaksi yang tercatat sebesar Rp122 triliun," ujar Kasan melalui keterangan tertulis di Jakarta, dikutip Senin (15/1).

Bappebti telah membentuk bursa aset kripto, lembaga kliring aset kripto, dan pengelola tempat penyimpanan aset kripto (depository) yang diresmikan pada 28 Juli 2023. Bursa aset kripto di Indonesia merupakan satu-satunya di dunia.

Baca Juga: Sah! PT KBI Ditunjuk Bappebti Jadi Kliring Berjangka Perdagangan Fisik Kripto

Pembentukan ekosistem tersebut mengacu pada Peraturan Bappebti (Perba) Nomor 13/2022 tentang Perubahan Atas Perba Nomor 8/2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik **Aset Kripto** di Bursa Berjangka. Kasan menekankan, pembentukan ekosistem aset kripto merupakan bukti pemerintah hadir dalam upaya perlindungan konsumen.

"Hal ini sekaligus memberikan kepastian berusaha bagi industri aset kripto," kata Kasan.

Terkait dengan adanya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan (P2SK), maka kewenangan pengaturan, pembinaan, dan pengawasan aset kripto dan derivatif keuangan akan beralih dari Bappebti ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) pada Januari 2025.

Kasan menyampaikan, saat ini OJK, BI, Kementerian Keuangan, dan Bappebti sedang dalam tahap finalisasi rancangan peraturan pemerintah (RPP). Perdagangan aset kripto pun diprediksi tumbuh positif seiring dengan halving bitcoin yang akan terjadi pada 2024. Maka, ekosistem yang telah dibangun dinilai harus berjalan dan menumbuhkan transaksi.

"33 CPFAK didorong menjadi Pedagang Fisik Aset Kripto, mengembangkan aset kripto lokal, membentuk Komite Aset Kripto, menyelesaikan RPP turunan UU P2SK, serta memastikan peralihan kewenangan dari Bappebti ke OJK dan BI tidak menimbulkan goncangan bagi industri aset kripto," ujarnya pula.